



KUNJUNGI DAERAH BENCANA - Gubernur Mahyeldi dampingi Presiden Joko Widodo mengunjungi daerah bencana banjir bandang di Agam. (ist)

Data Pengungsi Bertambah

LUBUK BASUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat data bencana tanah longsor dan banjir lahar dingin di Kabupaten Agam secara realtime.

Hal tersebut disampaikan Staf Pelaksana BPBD Agam Ghafur, bahwa pihaknya mencatat jumlah data korban pengungsi bertam bah menjadi 709 orang dalam kurun waktu 12 jam.

Pada 26 Mei 2024 pukul 06.00 WIB, jumlah pengungsi tercatat 257. Dirincinya, Kecamatan

Candung, 100 orang, Sungai Pua 121, Benuahampu 11 orang dan Kec IV Koto 25 orang.

Sementara pada hari yang sama pukul 18.00 WIB menjadi 709 orang dengan rincian Kecamatan Candung 447 orang, Sungai Pua 121, Benuahampu 11, IV Koto 25 dan Kecamatan Ampek Angkek 105 orang.

Penambahan jumlah ini berdasarkan update dari kecamatan. Sebelumnya hanya terdapat di Kecamatan Sungai Pua dan Candung, Untuk Candung sebelumnya

Banyak Budaya Lokal yang Terancam Punah

Bukittinggi, Singgalang

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, di hadapan pemangku kebudayaan se-Payakumbuh membeberkan berbagai persoalan dan tantangan ke depan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah makin banyak budaya lokal yang terancam punah.

Supardi menyebut persoalan ini muncul karena makin terkikisnya rasa cinta dan rasa memiliki terhadap berbagai budaya lokal tersebut. Tidak terkecuali niniak mamak, bundo kanduang, dan pemangku kebudayaan lain.

"Saya yakin tidak banyak di antara kita yang tahu dengan Sirompak, Basijombang, Tari Podang, Talempong Batu, dan berbagai kesenian asli Payakumbuh. Ini aset kita, tetapi kita membiarkan kesenian itu punah, padahal jika ditampalkan Tari Kecak Bali itu tidak ada apa adanya," papar Supardi saat acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan, Sabtu (25/5) di Bukittinggi.

Selain kesenian tersebut, masyarakat Payakumbuh juga mulai meninggalkan berbagai kuliner tradisional. Bahkan berbagai kuliner spesifik Payakumbuh tidak lagi dianggap sebagai kebanggaan.

"Botiah, pindik, galamai, ajik, kipang, itu beberapa makanan khas Payakumbuh, kini nasib kuliner itu



BIMTEK - Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan sejumlah narasumber saat acara bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan, Sabtu (25/5) di Bukittinggi. (ist)

merana, makanan ini ditiadakan di lampu merah secara asongan, padahal dengan kuliner itu seharusnya ekonomi Payakumbuh bisa bergerak," jelas Supardi.

Menurut Supardi, jika pemerintah dan masyarakat fokus mengolah dan memanajemen secara profesional kesenian dan kuliner ini, maka Payakumbuh bisa menjadi magnet wisatawan. Payakumbuh tidak lagi menjadi kota transit, tetapi sebagai kota tujuan.

"Insya Allah, jika elemen masyarakat, termasuk pemangku kebudayaan memiliki visi yang sama memajukan Payakumbuh, maka bukan mustahil Payakumbuh akan mendunia. Ini magnet untuk menarik pengunjung. Dan pada akhir-

nya menggerakkan roda perekonomian kota ini," tegas Supardi.

Supardi dalam kegiatan Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan ini, juga menjelaskan data data terkait berbagai persoalan Payakumbuh seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan lain sebagainya.

Bimtek angkatan ke dua ini dilaksanakan di Bukittinggi pada 25 hingga 27 Mei 2024. Sebanyak 70 peserta dari niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, cadiak pandai dan parik paga nagari, diberikan pembekalan oleh narasumber tentang kebudayaan di era digital.

Dalam acara pembukaan

pada Sabtu (25/5/2024) malam tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal mengharapkan para pemangku kebudayaan peran aktif memajukan daerah. Apalagi di era digital dengan tantangan yang luar biasa. "Kegiatan yang berasal dari Pokir Ketua DPRD Sumbar, Bapak Supardi ini, merupakan bentuk nyata bagaimana kebudayaan jadi ujung tombak dan jati diri kemajuan daerah ke depan," kata Jefrinal.

Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan digelar sebanyak 4 angkatan. Diharapkan kegiatan ini akan membawa dampak positif untuk kemajuan kebudayaan di Payakumbuh dan Sumatera Barat. (401)

PENGUMUMAN AMDAL

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) RENCANA KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PADA HUTAN PRODUKSI ATAS NAMA PT LANDARMIL PUTRA WIJAYA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

Sehubungan dengan rencana kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi pada areal seluas ± 32.913 Ha atas nama PT Landarmil Putra Wijaya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. PT Landarmil Putra Wijaya sudah memiliki Perizinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi atas nama PT Landarmil Putra Wijaya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Nomor 06122311111309004 tanggal 6 Desember 2023. Berdasarkan hasil penapisan mandiri Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Landarmil Putra Wijaya No. Registrasi : 65E8DAD2974A3 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Kami PT Landarmil Putra Wijaya selaku pemrakarsa kegiatan berencana akan melakukan studi AMDAL.

Studi AMDAL ini diperlukan untuk rencana kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi yang berlokasi di Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Selatan, dan Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, seluas ± 32.913 Ha atas nama PT Landarmil Putra Wijaya.

Pelaksanaan studi AMDAL ini meliputi kegiatan identifikasi, prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi hingga pasca operasi. Adapun dampak potensial yang akan timbul antara lain:

1. Kesempatan Kerja
2. Peluang Berusaha
3. Terganggunya Flora
4. Terganggunya Fauna
5. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Kami sangat mengharapkan saran dan tanggapan untuk dapat menjadi bahan kajian dan telaah dalam proses studi AMDAL ini. Saran dan tanggapan dapat disampaikan kepada:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Blok N L L 6, Wing C, Gedung Manggala Wanabekti Jl Jend. Gatot Subroto Jakarta Telp/Fax : (021) 5709090 Email : klpusat2018@gmail.com/33
2. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Gg. Panglun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jl. Raya Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
4. PT Landarmil Putra Wijaya
Jl. Kencana Timur XI No.85-86 Kel. Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Telp/Fax: 081555274060

Mentawai, 28 Mei 2024
Ttd
PT. LANDARMIL PUTRA WIJAYA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SOLOK

Jalan Jendral Sudirman No.1 Kota Solok Telp:(0756) 21366, 21376, 20944
Faksimile: (0756)21366 Telp:(0754) 20023, 20143, 20160, Faksimile: 0754-20033

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UUH No. 4 tahun 1996, PT. BRI Cabang Solok selaku peregang Hak Tanggungan pertama akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang melalui-bidder:

Furny Hatibah
- Sebidang tanah dan bangunan RUMAH dan Sepeda sesuai yang ada di bidangnya berdasarkan SHM No.04443/ Nagari Koto Baru atas nama Furny Hatibah, Luas 108 MP terletak di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubang, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat maka di lelangkan:
Nilai Limit Rp. 250.000.000,- Uang Jaminan: Rp. 50.000.000,-

Dengan Sistem-nya: 1. Cara Penawaran:
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara Tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (Open Bidding) melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia yang dapat diakses pada alamat domain: <http://www.portal.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang Aplikasi Portal Lelang Indonesia dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran:
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <http://www.portal.lelang.go.id> dengan menaruh serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (yang jernih) akan dibentangkan langsung ke nomor terbitnya.

3. Waktu Pelaksanaan:
1. Penawaran lelang melalui internet (Open Bidding) diujikan melalui alamat domain diatas pada:
Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Batas Akhir Penawaran Pukul : 14.00 Waktu Server Aplikasi Portal Lelang Indonesia sesuai WEB.
Alamat Domain : <http://www.portal.lelang.go.id>
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79 Padang
Penutupan Lelang : Setelah batas akhir penawaran

2. Peserta lelang diwajibkan menyerahkan diri dengan pengantaran waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas. Pembukaan Aplikasi Portal Lelang Indonesia dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79 Padang.

4. Uang Jaminan Lelang:
a. Peserta lelang diwajibkan menaruh uang jaminan lelang seperti tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah nominal yang diserahkan harus sama dengan uang jaminan yang dibentangkan perjual dalam pengumuman lelang ini, dibentangkan sekalian (bukan cicilan)
- Selain uang jaminan lelang HARUS sudah efektif dititipkan oleh KPKNL, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang Jaminan lelang dibentangkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan diklikan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas diinputkan valid.

5. Penawaran Lelang:
Penawaran harga bisa dilakukan setelah calon peserta lelang di validasi oleh pejabat lelang setelah peserta lelang menyerah uang jaminan lelang.

6. Pelaksanaan Lelang:
Penawaran Lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta dan diumumkan melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia.

7. Cbyek lelang dalam kondisi apa adanya dan dapat dilihat pada alamat di atas mulai hari ini sampai sebelum pelaksanaan lelang.

8. Pengumuman Cbyek Lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

9. Biaya Biaya yang timbul setelah pelaksanaan lelang ini seperti tanggungan PBB, Listrik, PDAM, dll menjadi Tanggung jawab pemenang lelang.

10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Solok, Telp. 0754-20023, atau Ser Ti Ganda Pata (08122564033) dan Dept Pemera (08139451976).

SOLOK, 28 Mei 2024
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SOLOK
Ttd
FAJAR MASRURI CHANDRA SETIawan
Pemimpin Cabang

KKN UNAND DI 87 NAGARI

Dukung Penanganan Stunting

PADANG - Universitas Andalas (Unand) menetapkan 87 nagari di 3 kabupaten di Sumbar sebagai wilayah program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini. Melalui program ini, Unand pun siap mendukung upaya penanganan stunting.

Hal itu dikatakan Rektor Unand, Efa Unnedi, saat audiensi bersama tim pemda Sumbar dalam percepatan dan penurunan stunting, beberapa waktu lalu di ruang kerja rektor.

Efa mengatakan, Unand memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan

solusi-solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti stunting, mengurangi kemiskinan dan lainnya.

Rektor pun menyambut baik kelanjutan kolaborasi penanganan stunting yang dimasukkan ke dalam program KKN Unand. Apalagi menurutnya stunting menciptakan dampak besar pada generasi bangsa.

Dia juga meminta agar pertemuan audiensi ini dapat dilanjutkan ke tingkat persiapan implementasi bersama UPT Pendidikan Luar Kampus Pokja KKN-MBKM

di bawah Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan dengan Bappeda Sumbar supaya kegiatan KKN mahasiswa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Efa menyebutkan, KKN Unand 2024 telah menetapkan 87 Nagari di 3 kabupaten masing-masing Pesisir Selatan, Solok Selatan dan Pasaman Barat, dengan tema KKN adalah membangun desa dengan spesifik cegah dan tanggulangi stunting.

Sementara itu, Denas Symond dari Unand menuturkan partisipasi perguruan tinggi dalam program ini telah dimulai sejak 2019 di Kabupaten Pasaman Barat dengan sebutan KKN Tematik Stunting dan sampai 2023 lalu dijadikan KKN dengan tema Membangun Desa dalam konsep MBKM.

"Selama kegiatan KKN mahasiswa membuat kegiatan kelompok dengan tema stunting untuk keluarga yang anaknya menderita stunting. Lalu mahasiswa memberikan dukungan kegiatan berdasarkan keahliannya masing-masing karena pencegahan dan penurunan stunting faktor yang menyebabkan dan tidak hanya faktor kesehatan dan gizi saja," ujarnya.

Ketua Bappeda Sumatera Barat, Medi

Iswandi berharap dukungan dari perguruan tinggi tidak hanya untuk program stunting akan tetapi juga untuk pencegahan dan penurunan angka kemiskinan ekstrem di desa.

"Praktik baik dalam pencegahan dan penurunan kemiskinan ekstrem ini di Sumbar telah memiliki pengalaman dan contoh yang dapat ditiru dari kunjungan gubernur bersama Bappeda ke India beberapa bulan lalu yang dianggap berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem," tambahnya.

Medi merinci penurunan kemiskinan tersebut dapat dilakukan melalui empat kegiatan utama yakni perlindungan sosial/safety net dengan BLT, pengembangan mata pencarian, pemberdayaan sosial dan edukasi perubahan perilaku, serta inklusi keuangan dengan upaya peningkatan pendapatan dan keharusan menabung.

Ia menyebutkan, dalam implementasi empat kegiatan itu didampingi oleh satu mahasiswa di India dan tentunya juga dapat berbuat seperti itu. Untuk itu, ia berharap dalam KKN Unand 2024 program stunting dan kemiskinan keluarga dapat dijadikan kegiatan kelompok oleh mahasiswa. (wy)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi selaku Jasa Pelelang PT Mandiri Setia dan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, dengan jenis penawaran lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet (Open Bidding) terhadap bidang jaminan sebagai berikut: PT INKUB AGRIPTAMA

Objek Lelang:
1. Sebidang tanah seluas 250.300 m² termasuk Tanaman Kelapa Sawit seluas 180.000 m² dan segala sesuatu terdapat di atasnya sesuai SHGU No. 35, masa berlaku hingga 02-05-2042, atas nama PT INKUB AGRIPTAMA Berkedudukan di Jakarta, terletak di Nagari Kiri, Kecamatan Kiri, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Sesuai Serifikat).
Harga Limit Rp.3.473.618.000,- Uang Jaminan Rp.694.736.800,-
2. 2 (dua) bidang tanah seluas 100.000 m² dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya seluas: 100.000 m² terletak di atasnya sesuai:
- SHGB 08 masa berlaku hingga 30-05-2030, seluas 100.000 m², atas nama PT. INKUB AGRIPTAMA Berkedudukan di Jakarta, terletak di Nagari Kiri, Kecamatan Kiri, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Sesuai Serifikat).
- SHGB 13 masa berlaku hingga 31-07-2033, seluas 13.150 m², atas nama PT. INKUB AGRIPTAMA Berkedudukan di Jakarta, terletak di Nagari Kiri, Kecamatan Kiri, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Sesuai Serifikat).
Harga Limit Rp.40.877.966.000,- Uang Jaminan Rp.8.175.592.000,-

Mesin dan Peralatan	Tahun	Kondisi
1. Sistem Pemrosesan Data	2019	Dukup
2. Sistem Informasi Sistem Perencanaan	2019	Dukup
3. Perangkat Lunak	2019	Dukup
4. Perangkat Lunak	2019	Dukup
5. Perangkat Lunak	2019	Dukup
6. Koneksi Jaringan	2019	Dukup
7. Perangkat Lunak	2019	Dukup
8. Perangkat Lunak	2019	Dukup
9. Perangkat Lunak	2019	Dukup
10. Perangkat Lunak	2019	Dukup
11. Perangkat Lunak	2019	Dukup
12. Perangkat Lunak	2019	Dukup
13. Perangkat Lunak	2019	Dukup
14. Perangkat Lunak	2019	Dukup
15. Perangkat Lunak	2019	Dukup
16. Perangkat Lunak	2019	Dukup
17. Perangkat Lunak	2019	Dukup
18. Perangkat Lunak	2019	Dukup
19. Perangkat Lunak	2019	Dukup
20. Perangkat Lunak	2019	Dukup

Keterangan:
- Nomor urut mesin yang dibentangkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang dibentangkan.
- Jaminan harus diserahkan melalui KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Setiap biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab peserta lelang.
- Calon Peserta lelang dapat melihat objek yang akan di lelang melalui aplikasi portal lelang.
- Barang yang dijual dalam kondisi apa adanya.

Awarisng:
Calon peserta lelang dapat melihat objek yang akan di lelang melalui aplikasi portal lelang.

Pengantaran lelang:
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada alamat ur website : <http://www.portal.lelang.go.id> atau www.portal.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Mega - 081320509030

Cara Penawaran	Open Bidding (dengan mengakses pada alamat ur http://www.portal.lelang.go.id atau www.portal.lelang.go.id)
Pendaftaran Lelang	Selasa, 11 Juni 2024
Pembukaan Lelang	Pukul 11.00 AM, Sesuai Sesuai WEB
Penutupan Lelang	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak diurus, maka penalti dinyatakan waupresedensi dan jaminan dibentangkan ke rekening
Batas Lelang Peroleh	2% dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	KPKNL Bukittinggi, Jl. Prof. Dr. H. Tarmizi, SH No. 03, Aur Kuning, Kec. Aur Kuning Tigo Batah, Kota Bukittinggi
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi	KPKNL Bukittinggi: 0752-34889 CP - Mega 0813 2001 9030

Bukittinggi, 28 Mei 2024

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PARAMAN

Jalan Merdeka No. 21 Paraman, Tanggal Rata-Peraturan: Telp: (075) 9100, 9106, 9108, 9109
Faksimile: (075) 9100, email: CRD@bri.co.id

RALAT PENGUMUMAN LELANG

Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Paraman yang terbit di Surat Kabar Harian Singgalang 17 Mei 2024, dengan ini kami sampaikan ralat/parbaikan pengumuman sebagai berikut:

**Debitur Kelompok Tari Sakato
SHM No 1735**

Tertulis:
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (Closed Bidding).

Sesungguhnya:
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (Open Bidding).

Demikian ralat ini untuk diketahui umum

Paraman, 28 Mei 2024
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG PARAMAN
Ttd
FERY WICODO
Pemimpin Cabang

DARI RAPAT KERJA PROVINSI

KONI Sumbar Berjuang Ekstra Soal Anggaran PON 2024

PADANG - SINGGALANG

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2024, Senin (27/5) di UNP Hotel and Convention Center, Air Tawar Padang.

Dalam raker itu dibahas beberapa agenda penting, diantaranya persiapan PON 2024 dan pelaksanaan Porprov 2025 yang rencananya digelar di Kota Solok.

Khusus menghadapi PON 2024 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara medio September mendatang, masalah anggaran menjadi salah satu isu sentral.

Untuk itu KONI Sumbar bakal berjuang ekstra dalam hal anggaran mengikuti alek terbesar olah raga prestasi nasional itu.

Pasalnya untuk menghadapi PON 2024 mendatang, KONI Sumbar membutuhkan anggaran sebesar Rp35 miliar. Hanya



RAKERPROV KONI Sumbar yang digelar di UNP Convention Center, Senin (27/5). (bambang)

saja ketersediaan anggaran dari pemerintah sebesar Rp12,5 miliar itu pun sudah masuk dengan dana rutin KONI Sumbar.

Hal ini lantaran, banyaknya agenda pemerintah seperti pelaksanaan Pilkada, di mana pemerintah meneken anggaran sebesar 40 persen.

Ketua KONI Sumbar, Ronny "Ompa" Pahlawan mengatakan, keterbatasan anggaran ini perlu disika-

pi bersama. Mengingat, PON merupakan barometer prestasi daerah dan menyangkut nama besar Ranah Minang dipentas nasioanal.

Di satu sisi, guna mencari dana tambahan, KONI Sumbar bakal melakukan berbagai upaya, salah satunya bakal mencari dana tambahan dari pengusaha Minang diperantauan.

"Kita sudah bentuk tim yang bertugas mencari

dana tambahan untuk kontingen Sumbar," terang Ompa kepada media termasuk Singgalang.

"Nantinya tim ini mendatangi para pengusaha dan perantau Minang. Mudah-mudahan upaya ini bisa mengetuk pintu hati urang awak di perantauan dalam membantu kontingen kita," sebut Ompa lagi.

Selain mengetuk pintu hati perantau Minang,

Ompa menyebut, masih ada peluang lain untuk penambahan anggaran PON.

Salah satunya dengan dana Pokir DPRD Sumbar sebesar Rp4 miliar. "Meski begitu, tentu jumlahnya belum mencukupi. Untuk itu, kita bersama berupaya, bahu membahu untuk pendanaan ini," tutup putra mantan Gubernur Sumbar Alm. Azwar Anas tersebut. (105)

Mahasiswa Kedapatan Simpan Ribuan Ekstasi

PEKANBARU - Seorang mahasiswa yang ditangkap karena menyimpan ribuan pil ekstasi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Riau. Pria berinisial GU (23) mengaku uang hasil penjualan barang haram itu untuk kuliah dan kehidupan sehari-hari.

"Benar, tersangka di-

tingkap tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau di Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru pada Rabu 23 Mei malam," kata Dirnarkoba Polda Riau, Kombes Manang Soebeti, Senin (27/5). Manang menjelaskan, saat penangkapan tim dipimpin AKBP Bobby Putra Ramadan menemukan barang bukti di dalam

dua kaleng yang berisi narkotika jenis pil ekstasi. "Tersangka ini perannya pengedar," ujar Manang, Senin (27/5).

Manang menjelaskan bahwa pil ekstasi yang ditemukan itu sebanyak 4.750 butir dan erimin atau happy five 5 butir. "Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah

panas karena berusaha melarikan diri dengan menabrakkan kendaraannya ke sepeda motor petugas," tambahnya.

Saat ini, tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tersangka mengaku mendapatkan barang dari AM yang saat ini sudah ditetapkan se-

bagai DPO. "Tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun," tutup Manang. (411)



DIPERIKSA - Mahasiswa yang kedapatan menyimpan ribuan pil ekstasi diperiksa di Mapolda Riau. (rahmat)

Pemprov Sumbar Terima Digital Government Award SPBE Summit 2024

Padang, Singgalang

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan Digital Government Award SPBE Summit 2024 untuk kategori Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik pada kategori provinsi.

Penghargaan itu diterima oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi. Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (27/5).

Hadir pada saat itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Turut mendampingi gubernur, Kadis Kominfo Sumbar Siti Aisyah, Kabiro Organisasi Fitriati dan Kepala Biro Umum, Edi Dharma serta Kaban Penghubung Aschari Cahyaditama

"Alhamdulillah Sumbar mendapat penghargaan Digital Award SPBE Summit 2024 bersama dengan 9 provinsi lainnya. Terimakasih atas dukungan semua pihak selama ini sehingga Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sumbar melonjak signifikan," ungkap gub-

hur usai menghadiri acara SPBE Summit 2024.

Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi penyelenggaraan Digital Government Award SPBE Summit 2024 sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan publik dan administrasi pemerintahan melalui sistem elektronik.

"Dengan adanya penilaian ini, tentu akan mendorong dan memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah untuk terus dapat memajukan SPBE-nya. Terima kasih kepada Kementerian PANRB sudah menginisiasi kegiatan ini," tambahnya.

Penghargaan ini juga diterima Pemerintah Provinsi lainnya yang dinilai baik dalam penerapan SPBE. Diantaranya dari Pemprov Jateng, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar Siti Aisyah, menyampaikan SPBE di Sumbar didukung penuh seluruh OPD melalui 100 lebih aplikasi layanan publik dan layanan pemerintah secara dig-



PENGHARGAAN SPBE - Gubernur Mahyeldi usai menerima penghargaan SPBE 2024 didampingi Kadis Kominfo Sumbar Siti Aisyah dan Kabiro Organisasi Fitriati. (ist)

ital. "Aplikasi tersebut tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, apakah itu perizinan, kesehatan dan informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat tentang program dan kinerja pemerintah," kata Siti Aisyah.

Siti menambahkan, secara kategori, indek SPBE Sumbar melonjak dari kategori baik 3,18 menjadi sangat baik yaitu 3,75.

"Namun kita tidak boleh berpuas diri karena

masih ada beberapa tantangan ke depan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat digital agar dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dan juga masalah blank spot," lanjut Siti.

Selain meningkatkan kerjasama program transformasi digital dengan Kementerian Kominfo, kabupaten dan kota, menurut Siti Aisyah, pihaknya saat ini juga tengah mengembangkan kerjasa-

ma dengan universitas dan perusahaan. Banyak program yang sedang dan sudah kita siapkan seperti program 1000 start up, pengembangan infrastruktur dan taman digital, desa digital, dan lainnya.

"Pada akhirnya kita berharap smart city dan smart province dapat terwujud dan masyarakat dapat bersaing dalam menghadapi ekonomi digital," pungkasi Siti.

Agenda SPBE Summit 2024 juga diisi dengan rangkaian kegiatan peluncuran jenama GovTech, dan penandatanganan komitmen 9 layanan SPBE prioritas.

Presiden RI Joko Widodo usai penyerahan penghargaan menegaskan bahwa birokrasi adalah melayani, bukan mempersulit apalagi memperlambat.

Menteri PANRB Abdulah Azwar Anas menyampaikan bahwa SPBE Summit 2024 merupakan tahapan menuju pelayanan publik Indonesia yang lebih mudah, cepat, transparan, dan layanannya bisa segera diakses masyarakat. (104)

SISWI YANG ALAMI LUKA BAKAR MENINGGAL

Polres Prioritaskan Penyelidikan

PARIK MALINTANG - Polres Pariaman bakal prioritaskan penyelidikan kasus kematian Aldelia, siswi SDN 10 di Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman yang merengas nyawa setelah mengalami luka bakar akibat kelaianan teman kelasnya.

Sebagaimana diketahui, Aldelia siswi Padang Pariaman yang terbakar saat Goro di sekolahnya tutup usia di RSUP M Djamil, Kota Padang, Selasa (21/5).

Wakapolres Pariaman Kompol Jon Hendri mengungkapkan bahwa laporan yang dibuat oleh pihak korban telah ditelaah dan masuk penyelidikan pihaknya. "Laporan dari pihak korban telah masuk ke unit PPA Satreskrim Polres Pariaman. Kasus ini bakal kami kawal dan lakukan penyelidikan mendalam," ungkap Wakapolres Kompol Jon Hendri, Senin (27/5).

Dijelaskannya kasus Aldelia begitu menyita perhatian publik bahkan kasus ini masuk pada kasus atau peristiwa menonjol.

"Maka ini (kasus) sedang dalam proses penyelidikan oleh PPA," katanya.

Jon Hendri berjanji kasus ini akan diselidiki agar pihak korban mendapatkan rasa keadilan. "Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Informasi lebih lanjut nanti kami kabarkan seiring dengan adanya hasil penyelidikan," ujar Wakapolres.

Diberitakan sebelumnya pihak keluarga Aldelia mendatangi Polres Pariaman untuk membuat laporan lantaran tidak ada itikat baik dari beberapa pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kematian Aldelia. "Kami membuat laporan ini karena sudah ditunggu-tunggu tidak ada itikat baik dari pihak sekolah dan keluarga pelaku untuk menyelesaikan kasus ini," kata Media Madona usai membuat laporan ke polisi pada Selasa kemarin. (108)

ETALASE Iklan SINGGALANG

Iklan BARI - MINI - KOLOM

Otomotif
Ponsel
Properti
Karier

Hubungi :
Jl. Veteran No. 17
Telp. (0751) 25001
Fax. (0751) 811005
Email : iklansinggalang@yahoo.co.id



KEHILANGAN

Sertifikat Tanah SHM : 325 Luas : 79M² a/n Muktar Sutan Batuah, Alamat : Kel. Pasar Usang, Hilang di sekitar Pd. Panjang. (100)

UNTUK INFORMASI BERLANGGANAN & PEKERJAAN IKLAN HUBUNGI :
(0751) 25001

KEHILANGAN

STNK Mobil BA 1389 IY a/n Muhammad Aditya Nugraha. Hilang di sekitar Kota Padang.

STNK Motor BA 2421 NAA a/n Agil Firnando. Hilang di sekitar Pd. Panjang. (100)

STNK Motor BA 5443 IA a/n Yas Efendi. Hilang di sekitar Kota Padang.

HARIAN UMUM SINGGALANG
MEDIA YANG TEPAT UNTUK MEMPROMOSIKAN
PRODUK USAHA ANDA



Selasa, 28 Mei 2024
(20 Zulkaidah 1445 H)

SUPARDI
KETUA DPRD
SUMBAR

IRSYAD SYAFAR
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

SUWIRPEN SUIB
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

INDRA DT RAJO LELO
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

RAELIS
SEKRETARIS
DPRD SUMBAR

IKUTI BIMTEK OPTIMALISASI KENERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DPRD Sumbar Komitmen Selesaikan Sisa Tugas

JAKARTA - SINGGALANG

Sebanyak 65 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa hingga akhir masa jabatan periode 2019-2024.

Adapun sejumlah pekerjaan yang tersisa itu diantaranya membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2023 hingga menuntaskan pembahasan sejumlah Ranperda untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Komitmen itu terungkap saat pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Sumbar, Rabu (22/5) di Acacia Hotel Jakarta. Bimbingan tersebut diadakan dari tanggal 22 hingga 25 Mei 2024 bekerjasama dengan Universitas Respati Indonesia.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka acara itu mengatakan, hingga akhirnya masa jabatan anggota dewan periode 2019-2024 berakhir, ada sejumlah agenda strategis sesuai dengan kewenangan dan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang harus diselesaikan.

Tidak hanya menyelesaikan ranperda yang tersisa, namun juga menuntaskan penyusunan komposisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS tahun



2024.

"Pekerjaan-Pekerjaan itu hendaknya dituntaskan dengan semangat pengabdian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas," kata Supardi.

Ia mengatakan ketika masa peralihan anggota DPRD Sumbar 2019-2024 ke 2024-2029 diadakan, maka akan melalui sejumlah proses seperti pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga menentukan pimpinan definitif. Jadi agenda strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah harus diselesaikan.

Dilanjutkannya, dalam penyusunan KUA-PPAS sebagai rujukan APBD juga memiliki mekanisme yang harus menjadi pertimbangan, salah satunya yang berhubungan dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Jika SIPD belum dibuka



harus dilakukan untuk membahas KUA-PPAS, dalam Bimtek yang dilaksanakan selama beberapa hari ini, hal tersebut juga akan dibahas.

Terakhir, Supardi mengharapkan agar Bimtek yang diadakan dapat meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang diamanahkan undang-undang. Dalam Bimtek Anggota DPRD Sumbar ini bertemakan Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Akhir Masa Jabatan).

Sementara itu Rektor Universitas Respati yang diwakili Nurmaningsih mengatakan pelaksanaan Bimtek merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2018 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Menurutnya, bahasan Bimtek secara umum adalah terkait fungsi DPRD yang tentu saja sudah sangat dipahami. Yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Terkait dengan Bimtek DPRD Sumbar menurutnya merupakan hal yang sangat strategis dalam kelangsungan kampus untuk kedepan. Terimakasih telah diberikan kepercayaan dan harus diapresiasi.

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat lebih untuk DPRD Sumbar secara kelemabagaan kedepannya,"katanya. Untuk diketahui, sebelum-

nya bimtek untuk pimpinan dan anggota DPRD Sumbar juga dilaksanakan. Agenda ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam menyelesaikan fungsi kedewanan.

Sebelumnya, bimbingan teknis (Bimtek) pimpinan dan anggota di Hotel Pangeran, Pekanbaru (19/2).

Saat bimtek tersebut, Supardi mengatakan Dikatakannya jelang habisnya masa jabatan sejumlah Ranperda mesti diselesaikan, yaitu Ranperda tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.

"Tidak hanya menyelesaikan Ranperda, namun juga akan membahas KUA-PPAS 2024," katanya.

Dia mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, harus ada pertanggungjawaban diakhir masa jabatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

"Kita tidak menginginkan pada akhir masa jabatan masih ada tugas dan kewajiban yang tercecer. Perlu strategi bagaimana bisa mengoptimalkan penggunaan waktu yang sangat terbatas ini," katanya

Supardi mengatakan, Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yang digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru meng-

gunakan tema Implementasi Per-

pres Nomor 53 Tahun 2023 dan Sukseskan Kinerja DPRD Periode Tahun 2019-2024.

pres Nomor 53 Tahun 2023 dan Sukseskan Kinerja DPRD Periode Tahun 2019-2024.

pres Nomor 53 Tahun 2023 dan Sukseskan Kinerja DPRD Periode Tahun 2019-2024.

